



Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Hildawati¹, Moris Adidi Yogya², Dia Meirina Suri³

¹Ilmu Administrasi, STIA Lancang Kuning, Dumai, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

 Email korespondensi: hildrias81@gmail.com

Submit : 28/09/2024 | **Accept** : 25/12/2024 | **Publish** : 30/12/2024

Abstract

This community service activity, titled "Development of an Integrated Digital Platform Between Government Agencies in Dumai City in Realizing SDGs," takes the form of a scientific presentation. The main issues discussed are the challenges in coordination between government agencies in Dumai City and the importance of digital system integration to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The purpose of this activity is to provide an understanding of the urgency of developing an integrated digital platform, identify the challenges faced, and compile recommendations for the development of the platform. The methods used in this activity include scientific presentations, panel discussions, and question-and-answer sessions involving various stakeholders, including government, academics, the private sector, and the community. The results of the activity show that although infrastructure and human resource challenges are the main obstacles, the development of an integrated digital platform can increase efficiency, transparency, and collaboration between agencies and accelerate the achievement of SDGs. The recommendations produced include improving digital infrastructure, strengthening human resource capacity, and managing integrated data safely and efficiently. This activity is expected to be the first step in digital transformation in Dumai City to support sustainable development.

Keywords: E-Government, Digitalizatio, SDGs, Community Service

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa Presentasi Ilmiah dengan judul kegiatan: "Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs". Isu pokok yang dibahas adalah tantangan dalam koordinasi antar instansi pemerintah di Kota Dumai serta pentingnya integrasi sistem digital untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi pengembangan platform digital yang terintegrasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk pengembangan platform tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pemaparan ilmiah, diskusi panel, serta sesi tanya jawab yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama, pengembangan platform digital terpadu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi antar instansi, serta mempercepat pencapaian SDGs. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup

peningkatan infrastruktur digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang terintegrasi secara aman dan efisien Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam transformasi digital di Kota Dumai guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: E-Government, Digitalisasi, SDGs, Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda global yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari penanggulangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, hingga aksi perubahan iklim. Bagi Indonesia, pencapaian target SDGs sangat penting untuk memastikan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kota Dumai, yang terletak di Provinsi Riau, merupakan pusat perkotaan yang sedang berkembang dengan potensi yang signifikan untuk memajukan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah. Kota Dumai memiliki berbagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan inisiatif pembangunan pada masing-masing sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Meskipun demikian, kolaborasi antarlembaga pemerintah di Kota Dumai menghadapi banyak tantangan, terutama terkait pengelolaan data, pengembangan kebijakan yang terintegrasi, serta pengawasan dan penilaian pelaksanaan program pembangunan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga pemerintah terkait perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Banyak lembaga yang masih bekerja sendiri-sendiri, sehingga terjadi redundansi program dan kebijakan. Misalnya, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mungkin menjalankan program yang memiliki tujuan yang sama; namun, tidak adanya koordinasi mengakibatkan program-program tersebut dijalankan secara terpisah, sehingga menyebabkan inefisiensi. Sebaliknya, organisasi seperti Dinas Lingkungan Hidup memiliki data penting yang dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun rencana pembangunan. Namun, tidak adanya sistem berbagi data yang memadai menghambat penggunaan informasi yang berharga ini secara optimal.

Dalam menghadapi tantangan ini, teknologi digital dapat menjadi solusi yang tepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program Pembangunan. Pembentukan platform digital terpadu di antara lembaga pemerintah diharapkan dapat mengatasi tantangan terkait koordinasi, penggabungan data, serta meningkatkan transparansi dan mendorong keterlibatan publik. Platform digital ini diharapkan dapat menggabungkan beragam data dari berbagai lembaga pemerintah, sehingga meningkatkan pengawasan dan administrasi inisiatif yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pembentukan platform digital terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan upaya kolaborasi antar seluruh instansi pemerintah di Kota Dumai. Misalnya, Bappeda yang berfungsi sebagai lembaga perencana pembangunan mampu mengakses data dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup secara real-time, sehingga memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, platform ini berfungsi untuk meningkatkan komunikasi antar instansi, sehingga seluruh instansi dapat

berkolaborasi secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk memajukan pencapaian target SDGs.

Pengembangan platform digital terpadu ini tidak hanya relevan untuk pencapaian SDGs, tetapi juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui program Smart City. Program ini mendorong setiap kota di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, memperkuat perekonomian lokal, serta melestarikan lingkungan. Kota Dumai, dengan potensi strategisnya sebagai kota industri dan pelabuhan, memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kota percontohan dalam penerapan teknologi digital guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Karakteristik penting dari platform ini adalah adanya dashboard terpadu, yang menyajikan kemajuan target SDGs secara visual. Dashboard ini memungkinkan setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara langsung mengamati kemajuan program yang sedang dilaksanakan dan pengaruhnya terhadap pencapaian target SDGs. Fitur ini tidak hanya melayani kepentingan pemerintah tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat luas untuk mengetahui secara transparansi pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pembangunan dan memberikan kontribusi yang mendalam kepada pemerintah. Lebih jauh, platform digital ini menawarkan fitur pengaduan masyarakat, yang memungkinkan warga Kota Dumai untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran mereka terkait program pembangunan yang mereka hadapi. Fitur ini memainkan peran penting dalam memajukan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan. Pembentukan saluran pengaduan terpadu memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keprihatinan mereka secara langsung kepada instansi pemerintah terkait, memfasilitasi pemrosesan keluhan ini secara cepat dan transparan.

Namun demikian, pengembangan platform digital ini tentu saja tidak tanpa tantangan. Tantangan yang umum terjadi terletak pada kesenjangan infrastruktur teknologi di antara berbagai lembaga pemerintah. Lembaga tertentu mungkin menghadapi kendala mengenai konektivitas internet atau perangkat keras yang memadai untuk memfasilitasi pemanfaatan platform digital. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menghadirkan tantangan tersendiri. Sejumlah besar pegawai pemerintah mungkin kurang terbiasa dengan teknologi digital dalam tugas rutin mereka, yang memerlukan pelatihan komprehensif untuk menjamin kemahiran mereka dalam memanfaatkan platform secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen yang kuat, khususnya dalam memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di semua lembaga. Selain itu, pelatihan dan bimbingan teknis harus diberikan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap pegawai pemerintah menguasai teknologi yang digunakan dalam platform tersebut. Dengan demikian, platform ini mampu berfungsi dengan baik dan memberikan keuntungan konkret dalam memfasilitasi pencapaian SDGs.

Berdasarkan kebutuhan ini, kami menyelenggarakan kegiatan Presentasi Ilmiah dengan judul materi "Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs". Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji potensi, tantangan, serta strategi pengembangan platform digital dalam mendukung pencapaian SDGs di Kota Dumai. Secara keseluruhan, latar belakang dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menjawab kebutuhan akan peningkatan koordinasi, integrasi data, serta transparansi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Dumai yang berkaitan dengan SDGs. Pengembangan Platform Digital Terpadu ini diharapkan dapat menjadikan Kota Dumai sebagai contoh keberhasilan dalam mewujudkan SDGs di tingkat daerah, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan tersebut di tingkat nasional dan global. Penciptaan platform digital terpadu ini bukan sekadar solusi sementara, tetapi merupakan investasi

strategis yang bertujuan untuk membangun sistem tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya melayani kepentingan masyarakat luas.

Urgensi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk presentasi ilmiah bertajuk "Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah di Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs" yaitu:

a. Mendukung Pencapaian SDGs.

Pengabdian ini sangat relevan dengan urgensi global untuk mencapai SDGs. Pemerintah daerah diharapkan terlibat dalam kolaborasi yang produktif untuk mencapai berbagai target SDGs yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Platform digital yang terintegrasi berpotensi meningkatkan kolaborasi lintas berbagai sektor dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan SDGs.

b. Peningkatan Efektivitas dan Keterbukaan Administrasi.

Urgensi lain adalah terkait dengan kebutuhan akan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Pengembangan platform digital yang terintegrasi antar instansi akan meminimalkan silo atau pengkotak-kotakan data dan proses antara lembaga. Ini akan mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat proses administratif, dan meningkatkan akuntabilitas. Transparansi yang lebih tinggi juga diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

c. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya.

Pengelolaan sumber daya, termasuk waktu, energi, dan dana, dapat dioptimalkan melalui peningkatan aksesibilitas dan pembagian informasi dan data antar instansi. Hal ini akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan, sekaligus mendorong alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk memenuhi tujuan pembangunan.

d. Meningkatkan Kerangka Kerja Teknologi dalam Pemerintah.

Pembentukan platform digital terpadu ini menjawab kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerangka kerja teknologi dalam struktur pemerintahan. Dalam lanskap digital kontemporer, teknologi informasi telah muncul sebagai komponen integral dari layanan publik. Tanpa adanya kerangka kerja yang terintegrasi, pemerintah kemungkinan akan menghadapi tantangan dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat. Akibatnya, komitmen ini sangat penting untuk mendorong kemajuan infrastruktur teknologi yang memfasilitasi pembentukan sistem tata kelola yang lebih cerdas. (tata kelola yang cerdas).

e. Peningkatan Layanan Publik.

Penerapan platform digital terpadu ini akan memfasilitasi akses yang lebih efisien dan cepat ke berbagai layanan pemerintah untuk publik. Misalnya, layanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi kependudukan dapat dioptimalkan melalui platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai lembaga terkait. Hal ini sangat penting dalam upaya memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih berkualitas.

f. Mendorong Kolaborasi lintas lembaga.

Untuk mewujudkan SDGs, sangat penting untuk adanya kolaborasi yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan, yang mencakup lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas global. Platform digital terpadu ini dapat meningkatkan kolaborasi ini dengan menawarkan data dan informasi yang dapat diakses dengan cepat dan efektif oleh berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.

Rasionalisasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "*Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah di Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs*" ini mencakup beberapa pertimbangan penting yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini. Berikut adalah beberapa poin rasionalisasi yang dapat dijelaskan:

- a. Mendukung pencapaian SDGs di Tingkat Daerah.
Melalui pembentukan platform digital yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat lebih efektif mengawasi dan mengelola inisiatif yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.
- b. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintahan.
Sistem digital yang terintegrasi dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen administrasi pemerintahan. Kehadiran platform yang memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar lembaga meningkatkan kecepatan dan keakuratan proses pelayanan publik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- c. Meningkatkan Kerja Sama Antar Instansi..
Pembentukan platform digital ini memungkinkan instansi pemerintah di Kota Dumai untuk berkolaborasi lebih efisien. Kerja sama yang efisien antar lembaga sangat penting untuk mengatasi masalah rumit yang memerlukan fokus lintas sektor, termasuk tantangan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Sistem yang terpadu akan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi.
- d. Mendorong Inovasi dalam Pelayanan Publik.
Pemerintah dapat mendorong inovasi dalam pemberian layanan publik melalui adopsi teknologi digital. Kemajuan platform digital menawarkan potensi untuk memperkenalkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan, termasuk aplikasi web atau seluler yang dirancang untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi.
- e. Menjawab Tantangan Digitalisasi.
Di era digital saat ini pemerintah harus segera menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi. Inisiatif ini dibenarkan untuk mengatasi tantangan digitalisasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Dumai. Pembentukan platform digital yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa pemerintah memberikan layanan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.
Kemajuan platform digital berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan sumber daya pemerintah. Sistem yang terintegrasi memfasilitasi akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- g. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya.
Melalui platform digital yang terintegrasi, lembaga pemerintah dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Manajemen data yang efektif akan memfasilitasi peningkatan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan. Hal ini penting dalam konteks pengelolaan anggaran pemerintah yang terbatas.
- h. Mendorong Keterlibatan Masyarakat.
Platform digital yang terintegrasi dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program, pemerintah dapat memperoleh umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kebijakan dan layanan publik.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa Presentasi Ilmiah dengan materi "Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs" adalah sebagai berikut: (1) Memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait pentingnya pengembangan platform digital terpadu untuk mendukung pencapaian SDGs di Kota Dumai; (2) Mengidentifikasi tantangan-tantangan

yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam mengembangkan dan mengoperasikan platform digital yang terintegrasi; (3) Menyusun rekomendasi strategis untuk pengembangan dan implementasi platform digital yang efektif dalam mendukung koordinasi antar instansi dan pelayanan publik; (4) Mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital di Kota Dumai.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Rencana pemecahan masalah akan melibatkan beberapa langkah kunci, di antaranya:

a. Kajian Teoretis dan Praktis.

Kegiatan ini dimulai dengan presentasi ilmiah yang membahas teori-teori serta praktik terbaik terkait pengembangan platform digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks pencapaian SDGs. Kajian ini akan memberikan wawasan dan panduan bagi pemerintah Kota Dumai dalam merancang platform digital yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

b. Diskusi dan Brainstorming.

Setelah presentasi ilmiah, akan diadakan sesi diskusi yang melibatkan para peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan platform digital terpadu.

c. Perumusan Rekomendasi.

Hasil dari diskusi akan dirangkum menjadi rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Kota Dumai dalam mengembangkan platform digital terpadu. Rekomendasi ini akan mencakup aspek teknis, kebijakan, serta peran masing-masing pemangku kepentingan.

d. Penyusunan Roadmap Implementasi.

Berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan, akan disusun roadmap implementasi yang berisi langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah Kota Dumai dalam mengembangkan dan mengoperasikan platform digital terpadu.

Pengembangan platform digital terpadu dalam konteks pemerintahan tidak terlepas dari konsep-konsep seperti e-government, smart city, dan data governance. Beberapa literatur yang relevan dalam konteks ini akan dibahas sebagai dasar teoretis untuk pengembangan platform digital terpadu di Kota Dumai.

E-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Menurut Heeks (2020) e-government dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik. Pengembangan platform digital terpadu merupakan salah satu implementasi dari e-government yang memungkinkan integrasi sistem antar instansi untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Konsep e-Government juga mencakup aspek integrasi dan koordinasi antar instansi pemerintahan (Ibad & Lolita, 2020), serta bagaimana teknologi dapat membantu dalam meminimalkan batas-batas structural (Kuncoro, 2022) yang biasanya ada dalam organisasi pemerintah (Al-Raisi & Al-Khouri, 2021). Teknologi informasi dalam e-Government bukan hanya alat bantu, tetapi juga katalis untuk reformasi dan inovasi dalam birokrasi (Ibad & Lolita, 2020; Putra et al., 2021).

Transformasi digital di sektor publik merujuk pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. (Afrizal, Utama, et al., 2023) menegaskan bahwa transformasi digital di sektor publik mencakup penerapan teknologi seperti big data, komputasi awan, dan kecerdasan buatan, yang meningkatkan kolaborasi lintas

sektoral dan organisasi. Platform digital terpadu (Isrokatun et al., 2023) memungkinkan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi secara instan dan meningkatkan kemampuan analitis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Purwaningrum, 2022). Penerapan platform digital terpadu ini diharapkan dapat memfasilitasi tujuan SDGs dengan mendorong hubungan kerja yang lebih kooperatif antara pemerintah dan masyarakat.

Kolaborasi antarlembaga merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang efektif (Rahmadhani, 2022). Mau (2021) menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang melibatkan banyak sektor. Kolaborasi yang efektif antarlembaga pemerintah memfasilitasi pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan data yang efisien. Melalui platform digital yang terintegrasi, lembaga dapat berkolaborasi untuk memantau pencapaian SDGs secara lebih efektif (Ramadhani & Madani, 2022), khususnya dengan meminimalkan redundansi dalam upaya dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pemerintah. Pembentukan platform digital terpadu di antara berbagai lembaga pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Platform digital dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (SDG 15) dengan meningkatkan koordinasi antara kementerian lingkungan hidup, pertanian, dan kehutanan. Platform digital dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkualitas (SDG 9) dengan memungkinkan pertukaran data antara kementerian pekerjaan umum dan transportasi. Mensah (2020) menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi pemerintah (Wallang, 2018) dan memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Meuleman, 2021).

Di Indonesia, inisiatif untuk memajukan platform digital di sektor publik sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik (Indrayani, 2020). Pemerintah Indonesia telah memulai berbagai program digital (Damanik, 2012), termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan melalui teknologi informasi. Pembentukan platform digital terpadu di antara lembaga pemerintah memiliki potensi yang signifikan; namun, banyak tantangan yang harus diatasi. Selain itu, masalah keamanan data (Rinaldi & Krisnadi, 2019), perbedaan peraturan, dan penolakan terhadap perubahan menghadirkan tantangan terhadap penerapan platform digital ini. Pemerintah harus mengatasi tantangan ini dengan merumuskan kebijakan yang eksplisit, mendidik pegawai negeri dalam pemanfaatan teknologi baru, dan membangun infrastruktur yang memfasilitasi interoperabilitas antar sistem.

METODE KEGIATAN

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bersifat partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif melibatkan semua pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, di setiap tahapan kegiatan. Keterlibatan seluruh aspek pemangku kepentingan diharapkan dapat menjamin bahwa platform digital yang akan dikembangkan memenuhi persyaratan dan harapan semua pemangku kepentingan.

Strategi kolaboratif ditekankan untuk mendorong sinergi antar berbagai lembaga pemerintah di Kota Dumai. Kolaborasi ini berupaya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mencapai SDGs dan merumuskan solusi yang tepat. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun platform terpadu melalui kolaborasi berbagai lembaga untuk memfasilitasi pencapaian SDG secara efektif.

2. Rancangan Kegiatan

Kegiatan Presentasi Ilmiah ini dilaksanakan menggunakan media Zoom Meeting pada:

- Hari/Tanggal : Senin, 16 September 2024
- Waktu : 08.30 - 12.30 WIB

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pengembangan teknologi digital dan pencapaian SDGs di Kota Dumai. Peserta terdiri dari:

- a. Pemerintah Kota Dumai: Perwakilan dari instansi pemerintah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta beberapa instansi lainnya yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program terkait teknologi digital serta SDGs.
- b. Akademisi dan Peneliti: Para dosen, peneliti, serta mahasiswa dari Universitas Dumai dan beberapa universitas lainnya di Provinsi Riau yang memiliki ketertarikan dan keahlian di bidang teknologi informasi, pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan publik.
- c. Sektor Swasta: Perwakilan dari perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pengembangan infrastruktur digital, baik yang berbasis di Kota Dumai maupun wilayah sekitarnya.
- d. Masyarakat Umum: Masyarakat Dumai yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan teknologi digital dan pembangunan kota berkelanjutan.

Kegiatan Presentasi Ilmiah oleh Ketua Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema “Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs” Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab yang merupakan sesi interaktif antara peserta dengan para pemateri untuk membahas lebih dalam mengenai topik yang dipresentasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, "Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah di Kota Dumai untuk Pencapaian SDGs," berupaya membangun sistem digital yang mengintegrasikan berbagai instansi di Kota Dumai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Platform digital ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di wilayah tersebut melalui peningkatan koordinasi antar instansi. Kegiatan ini meliputi berbagai tahap, termasuk analisis kebutuhan, pengegiatan Presentasi Ilmiah dengan tema materi: Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs telah dilaksanakan dengan sukses. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat pemerintah, akademisi, pelaku usaha, perwakilan dari organisasi masyarakat, serta pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan teknologi digital dan pembangunan berkelanjutan. Selama kegiatan, data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk sesi presentasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab dengan peserta yang beragam.

Seluruh rangkaian kegiatan mencerminkan antusiasme peserta terhadap pentingnya transformasi digital untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Dumai. Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam presentasi ilmiah ini adalah pentingnya integrasi antar instansi pemerintah melalui teknologi digital, pengelolaan data yang terstruktur, tantangan dan peluang dalam penerapan platform digital, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mendukung penerapan tersebut.

Dalam presentasi ilmiah ini, terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan utama terkait upaya pengembangan platform digital terpadu untuk mendukung pencapaian SDGs di Kota Dumai. Hasil diskusi yang muncul selama kegiatan ini dapat disajikan dalam beberapa tema besar, yang mencakup:

1. Tantangan Pengembangan Platform Digital di Kota Dumai.

Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah adanya tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur digital di Kota Dumai. Kota ini, yang merupakan salah satu kota strategis di pesisir Sumatera, masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan teknologi digital, terutama dari segi infrastruktur, akses internet, dan sumber daya manusia yang memadai. Beberapa instansi pemerintah telah mulai mengadopsi teknologi informasi dalam operasionalnya, namun integrasi antar instansi belum optimal (Afrizal, Wallang, et al., 2023).

Selain itu, diskusi juga menyoroti bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat kematangan digital antara instansi yang satu dengan yang lain. Sebagian besar instansi masih menjalankan sistem administrasi secara manual (Hildawati, 2019) atau menggunakan sistem terpisah yang tidak saling terhubung, sehingga menciptakan tumpeng tindih data. Integrasi sistem yang holistik dianggap sangat penting untuk menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik serta meningkatkan pengawasan terhadap program-program pemerintah yang mendukung pencapaian SDGs.

Berdasarkan temuan ini, tantangan utama yang diidentifikasi dalam pengembangan platform digital terpadu meliputi:

- a. Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah-wilayah pinggiran Kota Dumai yang belum sepenuhnya terjangkau oleh akses internet berkualitas.
- b. Kesenjangan digital antar instansi pemerintah, di mana beberapa instansi memiliki teknologi yang lebih maju dibandingkan instansi lainnya.
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam hal pengelolaan dan pertukaran data, yang menyebabkan duplikasi data serta inefisiensi dalam pelayanan.
- d. Sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terampil dalam penggunaan teknologi digital, terutama di tingkat staf administratif.

2. Potensi Manfaat Platform Digital Terpadu

Meskipun terdapat banyak tantangan, presentasi ilmiah ini juga mengungkapkan potensi manfaat besar dari pengembangan platform digital terpadu bagi Kota Dumai. Beberapa manfaat yang diidentifikasi oleh para peserta meliputi:

- a. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi: Dengan adanya integrasi antar instansi, proses administrasi di pemerintah Kota Dumai dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Data dari berbagai instansi dapat diakses secara lebih cepat dan akurat, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.
- b. Peningkatan Pelayanan Publik: Melalui platform digital yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih mudah, seperti layanan perizinan, informasi terkait kesehatan, pendidikan, hingga layanan kependudukan. Hal ini diharapkan akan mengurangi antrian di kantor pemerintah serta mempercepat waktu pelayanan.
- c. Pemantauan Pencapaian SDGs: Dengan adanya data yang terintegrasi dari berbagai sektor, pemerintah Kota Dumai dapat memantau progres pencapaian SDGs secara lebih terukur. Data yang akurat dan real-time memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah berjalan serta menyesuaikan strategi yang lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- d. Kolaborasi Antar Instansi dan Pihak Eksternal: Pengembangan platform digital juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik antar instansi, serta dengan pihak eksternal seperti sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya bersama dalam mencapai target SDGs di Kota Dumai.

3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan, beberapa rekomendasi kebijakan telah disusun oleh para peserta sebagai solusi atas tantangan-tantangan yang diidentifikasi. Rekomendasi ini meliputi:

- a. Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah Kota Dumai harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital, khususnya di wilayah yang masih minim akses internet. Pembangunan infrastruktur ini mencakup jaringan broadband, pusat data, serta peningkatan kapasitas server untuk mendukung sistem digital yang terintegrasi.
- b. Peningkatan Literasi dan Kapasitas SDM: Salah satu hal yang dianggap krusial adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Program pelatihan khusus harus disiapkan untuk meningkatkan keterampilan digital bagi pegawai pemerintah agar mereka dapat mengelola platform digital dengan baik.
- c. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi: Dalam pengembangan platform digital terpadu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dianggap penting untuk mendapatkan solusi inovatif dalam pengembangan teknologi serta penerapan sistem digital yang berkelanjutan.
- d. Penerapan Sistem Keamanan Data yang Ketat: Dalam mengelola data yang terintegrasi antar instansi, pemerintah harus memastikan bahwa sistem keamanan data yang kuat diterapkan untuk melindungi informasi pribadi warga negara. Sistem keamanan siber yang memadai harus menjadi prioritas dalam pengembangan platform digital.
- e. Penyusunan Roadmap Digital Terpadu: Pemerintah perlu menyusun roadmap atau peta jalan yang jelas dan realistis dalam mengembangkan platform digital terpadu. Roadmap ini harus mencakup tahapan pengembangan, pengujian, implementasi, hingga evaluasi dan pemeliharaan sistem digital.

Selama kegiatan, data yang diperoleh dari presentasi dan diskusi dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dan tantangan pengembangan platform digital terpadu. Berikut adalah analisis dan interpretasi hasil dari kegiatan ini:

a. Analisis Infrastruktur Digital

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 60% wilayah Kota Dumai sudah memiliki akses internet yang memadai, namun masih terdapat sekitar 40% wilayah yang belum memiliki akses internet yang stabil dan cepat, terutama di daerah pesisir dan pedalaman. Akses internet yang terbatas ini menjadi penghalang utama dalam penerapan teknologi digital, terutama untuk integrasi antar instansi pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan internet perlu ditingkatkan, termasuk investasi dalam infrastruktur jaringan yang lebih baik.

Tabel berikut menunjukkan distribusi wilayah di Kota Dumai berdasarkan akses internet:

Tabel 1. Distribusi Wilayah Di Kota Dumai Berdasarkan Akses Internet

Wilayah Kota Dumai	Akses Internet Stabil	Akses Internet Terbatas
Pusat Kota	90%	10%
Daerah Pinggiran	50%	50%
Daerah Pesisir	40%	60%
Daerah Pedalaman	30%	70%

b. Pengelolaan Data Terintegrasi

Saat ini, sebagian besar instansi pemerintah di Kota Dumai menggunakan sistem manajemen data yang terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan adanya duplikasi data dan kesulitan dalam melakukan pertukaran informasi antar instansi. Data yang tidak terintegrasi juga menyulitkan pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi program-program yang terkait dengan SDGs. Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen data yang terintegrasi sangat

diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh satu instansi dapat diakses oleh instansi lain yang membutuhkannya.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Platform Digital

Salah satu temuan penting dari diskusi adalah perlunya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Meskipun Kota Dumai memiliki potensi besar dalam hal penerapan teknologi digital, partisipasi masyarakat dalam penggunaan platform digital masih rendah. Banyak warga yang belum familiar dengan teknologi digital dan masih terbiasa dengan sistem manual. Oleh karena itu, program sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan platform digital dengan baik.

Tabel berikut menunjukkan hasil survei tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital di Kota Dumai:

Jenis Layanan Digital	Tingkat Partisipasi Masyarakat
Layanan Perizinan Online	45%
Informasi Kesehatan Digital	50%
Layanan Kependudukan Online	40%
Informasi Lingkungan dan Bencana	35%

Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital masih di bawah 50% untuk sebagian besar layanan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, termasuk melalui program pelatihan, penyuluhan, serta penyediaan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan digital.

4. Pembahasan dan Interpretasi Temuan

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan platform digital terpadu di Kota Dumai merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak untuk mendukung pencapaian SDGs. Namun, keberhasilan implementasi platform ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, pengelolaan data yang baik, dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa temuan penting dari kegiatan ini adalah:

- Infrastruktur Digital yang Belum Merata:** Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Kota Dumai menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan platform digital terpadu. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal.
- Pentingnya Pengelolaan Data yang Terintegrasi:** Integrasi data antar instansi pemerintah adalah salah satu kunci sukses dalam pengembangan platform digital. Data yang terintegrasi akan memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian SDGs secara lebih efektif, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
- Peningkatan Literasi Digital:** Partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital masih rendah, sehingga program sosialisasi dan edukasi digital perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang manfaat teknologi digital, terutama dalam hal akses layanan publik dan partisipasi dalam pembangunan kota.

Temuan-temuan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kota Dumai dalam pengembangan platform digital terpadu. Dengan perencanaan yang tepat dan kerjasama yang erat antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, platform digital ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan visi SDGs.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Presentasi Ilmiah dengan materi presentasi: Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs, telah berhasil dilaksanakan dan menghasilkan beberapa temuan penting terkait dengan pengembangan infrastruktur digital di Kota Dumai. Diskusi yang dilakukan selama kegiatan ini menyoroti pentingnya platform digital terpadu sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi antar instansi pemerintah, serta dalam rangka mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu kesimpulan utama dari kegiatan ini adalah bahwa pengembangan platform digital terpadu sangat mendesak bagi Kota Dumai untuk mengatasi masalah fragmentasi data dan kurangnya koordinasi antar instansi. Saat ini, banyak instansi pemerintah di Kota Dumai yang masih bekerja secara silo, yang menyebabkan duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan publik. Dengan adanya platform digital yang terintegrasi, seluruh data dari berbagai instansi dapat dikelola secara lebih efisien dan efektif, memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data serta mempercepat pencapaian target-target SDGs.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah-wilayah pinggiran Kota Dumai, menjadi tantangan utama dalam pengembangan platform digital. Akses internet yang belum merata menghambat implementasi sistem digital yang optimal. Penguatan infrastruktur ini sangat diperlukan untuk memastikan semua wilayah di Kota Dumai dapat terhubung dengan platform digital yang dirancang.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital masih rendah, dan hal ini dapat diatasi melalui program sosialisasi dan edukasi yang lebih baik. Sementara itu, aparatur pemerintah juga memerlukan peningkatan keterampilan digital agar mampu mengelola dan mengoperasikan platform digital secara optimal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan ini, berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan platform digital terpadu di Kota Dumai:

a. Untuk Pemerintah Kota Dumai.

Pemerintah harus segera menyusun roadmap digital yang mencakup langkah-langkah konkret dalam pengembangan infrastruktur digital terpadu. Roadmap ini harus mencakup investasi dalam infrastruktur internet, khususnya di wilayah pinggiran yang masih minim akses. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antar instansi untuk memastikan bahwa sistem manajemen data terintegrasi dapat berjalan secara efisien. Pemerintah juga disarankan untuk menggandeng sektor swasta dan akademisi dalam mengembangkan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Untuk Instansi Pemerintah Kota Dumai.

Setiap instansi diharapkan meningkatkan koordinasi antar divisi dan sektor agar penggunaan platform digital tidak hanya berfokus pada satu bidang, melainkan dapat diterapkan secara menyeluruh. Pelatihan keterampilan digital juga menjadi prioritas, sehingga staf di setiap instansi dapat memanfaatkan sistem digital dengan efektif. Dengan begitu, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik akan meningkat.

c. Untuk Sektor Swasta.

Pelaku usaha dan perusahaan teknologi di Kota Dumai diharapkan turut serta dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital, baik melalui investasi langsung maupun kolaborasi dengan pemerintah. Perusahaan-perusahaan teknologi dapat

menawarkan solusi inovatif yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam pengembangan platform digital terpadu, seperti dalam hal keamanan data dan manajemen sistem informasi.

d. Untuk Masyarakat Kota Dumai.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan platform digital. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya literasi digital harus terus dilakukan. Masyarakat diharapkan untuk semakin aktif dalam memanfaatkan layanan publik berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi interaksi dengan pemerintah dan mendapatkan manfaat penuh dari transformasi digital yang sedang berlangsung.

e. Untuk Akademisi dan Peneliti.

Akademisi diharapkan untuk terus melakukan penelitian dan kajian yang mendalam mengenai pengembangan platform digital di sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini akan sangat berharga dalam memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah, serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian SDGs melalui teknologi digital.

Dengan rekomendasi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, pengembangan platform digital terpadu di Kota Dumai dapat berjalan lebih baik dan efektif, serta secara signifikan berkontribusi pada pencapaian SDGs di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat berupa Presentasi Ilmiah dengan tema Pengembangan Platform Digital Terpadu Antar Instansi Pemerintah Kota Dumai dalam Mewujudkan SDGs.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Dumai yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam hal fasilitas maupun partisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada STIA Lancang Kuning Dumai, yang melalui dukungan akademisnya telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kepada para dosen dan staf yang telah membantu dalam proses penyelenggaraan, serta kepada para mahasiswa yang telah ikut serta berkontribusi dalam kegiatan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta dari berbagai instansi, organisasi, dan pihak swasta yang telah berbagi pengetahuan, ide, dan wawasan selama diskusi berlangsung. Dukungan dari semua pihak telah menjadikan kegiatan ini bermanfaat dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Akhir kata, kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pengembangan teknologi digital serta pencapaian SDGs di Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Utama, S., Hildawati, H., Yuhardi, Y., & Sofyan, S. (2023). Factors Influencing The Intention of Businesses Actor To Adopt Online Applications: An Empirical Evidence In Indonesia. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 3(1). <https://doi.org/10.52970/grmapb.v3i1.212>
- Afrizal, D., Wallang, M., Hijeriah, E. M., Erlianti, D., & Yusuf, I. M. (2023). E-Government services: Improving employment services in Dumai City. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i2.10266>

- Damanik, M. P. (2012). Public's Literate of Internet for Implementing E-Public Service in Deli Serdang District, North Sumatra. *Widyariset*, 15(1), 67–74. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Heeks, R. (2020). Understanding e-Governance for Development. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540058>
- Hildawati, H. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Unit Resident Sat Lantas Polres Dumai. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.21>
- Ibad, S., & Lolita, Y. W. (2020). Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan Smartcity Kabupaten Situbondo). *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).
- Indrayani, E. (2020). E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-Government). In *LPP Balai Insan Cendikia* (Issue March). https://www.academia.edu/download/60457564/Buku_E-government20190901-116843-z73m6i.pdf
- Isrokatun, I., Sunaengsih, C., Maulana, M., Syahid, A. A., & Karlina, D. A. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Digital-Terpadu Untuk Perkuliahan Online Pada Mahasiswa Program Studi PGSD. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 20(1). <https://doi.org/10.17509/jap.v20i1.58196>
- Kuncoro, A. A. (2022). Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli. *11 Januari*.
- Mau, E. (2021). Strategi diplomasi pariwisata premium pulau Komodo sebagai perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pemerintahan Joko Widodo . In *Thesis*.
- Mensah, I. K. (2020). E-Government Services Adoption: An Extension of the Unified Model of Electronic Government Adoption. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020933593>
- Meuleman, L. (2021). Public administration and governance for the sdgs: Navigating between change and stability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13115914>
- Purwaningrum, R. (2022). Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Pengembangan Platform Digital Terpadu Untuk Pengelolaan Kesejahteraan Psikologis Guru BK: Analisis Kebutuhan. *Ijgc*, 11(2).
- Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Mobile JKN di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1).
- Rahmadhani, S. (2022). Analisis Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development (SDGs) Dise Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 01(02).
- Ramadhani, C., & Madani, M. (2022). Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Journal UNISMUH*, 3(6).
- Rinaldi, R., & Krisnadi, I. (2019). Analisis Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Keamanan Data Digital. In *Universitas Mercubuana, Manajemen ICT*. https://www.academia.edu/download/61630681/Analisis_Dampak_Revolusi_Industri_4.0_Terdapat_Keamanan_Data_Digital20191229-88394-mhopif.pdf
- Wallang, M. (2018). *Determinants that Influence Citizen's Usage of Different E-Government Services: A Malaysian Case Study*. 1–165. <http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:720289>